

EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL [**Indeks Pembangunan Statistik**]

HENRI WAGIYANTO

Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Demak

*disampaikan pada Forum Satu Data Kab. Demak
Triwulan III 2022*

[Bappelitbangda], [22-09-2022]



3 JENIS STATISTIK

UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik



Statistik Dasar

Penyelenggara:
BPS

untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional, makro

Statistik Sektoral

Penyelenggara:
K/L/OPD

untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

Statistik Khusus

Penyelenggara:
Lembaga/Organisasi/
Perorangan/Masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat

PRINSIP SATU DATA

*Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia*



Standar Data

standar yang mendasari data tertentu



Interoperabilitas

kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi



Metadata

informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data



Kode Referensi

tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik

EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



Tujuan

- *Mengukur capaian kemajuan Penyelenggaraan Statistik Sektoral*
- *Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral*
- *Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik sektoral*



Proses Evaluasi

- *Sistematis, Verifikasi, Klarifikasi*
- *Mengukur tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral atas berbagai indikator yang telah disusun*



Hasil Evaluasi

[Indeks Pembangunan Statistik]

- *Capaian statistik sektoral*
- *Menyusun program-program pembinaan agar lebih efektif, efisien, sesuai kebutuhan*



STATISTIK SEKTORAL

Statistik Sektoral adalah **statistik** yang pemanfaatannya ditujukan untuk **memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu** (Pemerintah Pusat/ Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.



Hingga saat ini, ada 3 cara pengumpulan data statistik:

1. **Sensus**
2. **Survei**
3. **Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)**





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang **sejauh mana** suatu kegiatan tertentu telah dicapai atau seberapa besar perbedaan pencapaian itu dengan suatu **standar tertentu** dan proses penilaiannya secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk **mengukur tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**.



MANFAAT DAN OUTCOME EPSS



MANFAAT

- Memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan statistik sektoral
- Menjadi dasar pembinaan statistik sektoral khususnya penetapan prioritas dan target pembinaan
- Meningkatkan pembangunan statistik
- Terwujudnya statistik berkualitas dari segi penyelenggaraan dan produknya



OUTCOME

- Statistik berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik
- Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dan pengukuran keberhasilan pembangunan nasional
- Pemanfaatan data oleh masyarakat, akademisi, sektor swasta dan lembaga internasional, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional (POLEKSOSBUDHANKAM)





TIM PENILAI



Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Tim Penilai Internal (TPI) adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Badan (TPB) adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Penilai sebagai anggota TPI *ada* yang disebut sebagai

Operator dan **Supervisor**



Penilai sebagai anggota TPB *biasa* disebut juga sebagai

Asesor





RESPONDEN, WALIDATA, PRODUSEN DATA

Responden

orang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan Penilai.

Wali Data

unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Produsen Data

unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PENILAIAN EPSS

Penilaian Dokumen

penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh **TPB** untuk verifikasi informasi.

Penilaian Visitasi

penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh **TPB** pada lokus penilaian untuk validasi informasi.

2

1

Penilaian Mandiri

penilaian yang dilakukan oleh **TPI** pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3

Penilaian Interviu

penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara **TPB** dengan **TPI** untuk klarifikasi informasi.

4





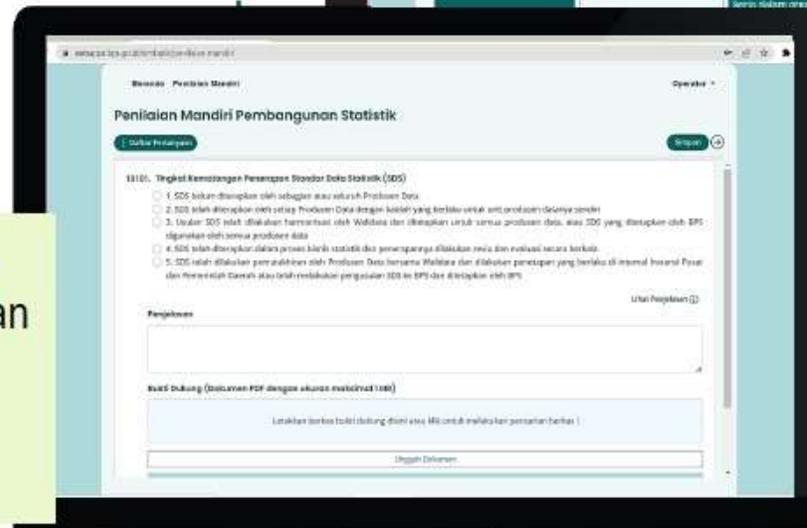
INSTRUMEN PENILAIAN: APLIKASI EPSS

Instrumen yang digunakan Tim Penilai dalam kegiatan ini berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikemas dalam aplikasi berbasis *Web*

Aplikasi EPSS untuk:

- Penilaian tingkat maturitas
- Unggah bukti dukung
- Catatan proses

Detail mengenai instrumen aplikasi LKE akan dijelaskan lebih lanjut pada saat paparan Penjelasan LKE dan Entri Aplikasi





KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Kriteria

alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi yang mendeskripsikan setiap tingkat kematangan

Tingkat Kematangan

Capability Maturity Model
(CMM)



perkembangan kapabilitas / kemampuan organisasi di bidang penyelenggaraan statistik sektoral

1. Rintisan
2. Terkelola
3. Terdefinisi
4. Terpadu dan Terukur
5. Optimum

TUJUAN EPSS

(Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)

01

Mengukur **capaian kemajuan Penyelenggaraan Statistik Sektoral** pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

02

Meningkatkan **kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral** pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

03

Meningkatkan **kualitas pelayanan publik** di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah





5 DOMAIN IPS

(Indeks
Pembangunan
Statistik)



domain 1

PRINSIP SDI

Prinsip SDI

Standar Data Statistik	Metadata Statistik	Interoperabilitas Data	Kode Referensi dan/atau Data Induk
Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi



Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019

Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran implementasi prinsip SDI

Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI



domain 2 KUALITAS DATA

Kualitas Data

Relevansi

Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna

Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data

Akurasi

Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data

Aktualisasi & Ketepatan Waktu

Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data

Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi

Aksesibilitas

Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data

Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data

Keterbandingan & Konsistensi

Tingkat Kematangan Keterbandingan Data

Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik



Dasar pemilihan indikator di Domain-2 mengadopsi NQAF, disesuaikan dengan kondisi K/L/Pemda dalam pemenuhan indikator



Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda dalam proses menghasilkan Statistik yang Berkualitas

Why?

domain 3

PROSES BISNIS STATISTIK

Cara Perolehan Data

Penyelenggara Statistik Sektoral memperoleh data melalui:



1. Survei



2. Kompilasi produk administrasi (dari pencatatan administrasi/registrasi)

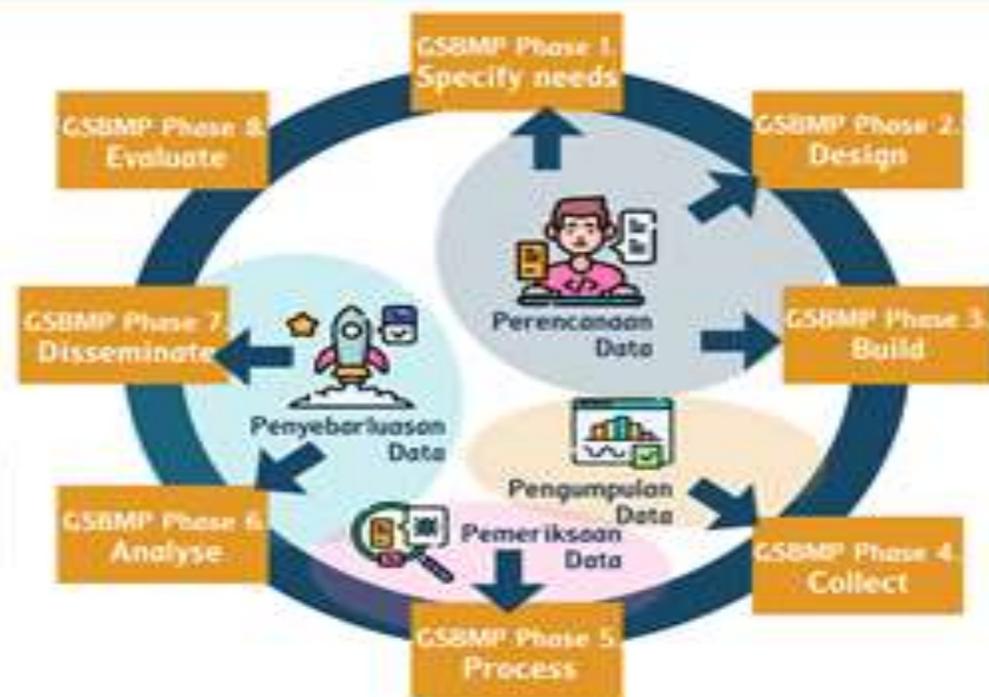


3. Cara lain sesuai perkembangan IPTEK

Proses Bisnis Statistik



Mapping antara GSBPM & Aspek penyelenggaraan statistik dalam SDI



Why?

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda dalam upaya menerapkan Bisnis Proses Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terstandar (GSBPM) dan aspek SDI

Kelembagaan

Profesionalitas

Tingkat Kematangan Penjaminan
Transparansi Informasi Statistik

Tingkat Kematangan Penjaminan
Netralitas dan Objektivitas
terhadap Penggunaan Sumber
Data dan Metodologi

Tingkat Kematangan Penjaminan
Kualitas Data

Tingkat Kematangan Penjaminan
Konfidensialitas Data

SDM yang memadai dan Kapabel

Tingkat Kematangan Penerapan
Kompetensi SDM Bidang Statistik

Tingkat Kematangan Penerapan
Kompetensi SDM Bidang
Manajemen Data

Pengorganisasian Statistik

Tingkat Kematangan Kolaborasi
Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Tingkat Kematangan
Penyelenggaraan Forum
Satu Data Indonesia

Tingkat Kematangan Kolaborasi
dengan Pembina Data

Tingkat Kematangan
Penyelenggaraan Pelaksanaan
Tugas Sebagai Walidata

Dasar pemilihan indikator di
Domain-4 untuk menilai
tingkat kelembagaan
penyelenggara statistik serta
pelaksanaan tugas dalam
kerangka SDI

Why?

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja
K/L/Pemda dalam tata kelola
penyelenggaraan Statistik (Kelembagaan)
di aspek Profesionalitas, SDM,
dan pelaksanaan tugas

domain 5 STATISTIK NASIONAL

Dasar pemilihan indikator di Domain-5 untuk menilai pemenuhan target pelaksanaan Sistem Statistik Nasional oleh para penyelenggara kegiatan statistik baik dasar dan sektoral



Statistik Nasional



Pemanfaatan Data Statistik

Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Pengelolaan Kegiatan Statistik

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Penguatan SSN Berkelanjutan

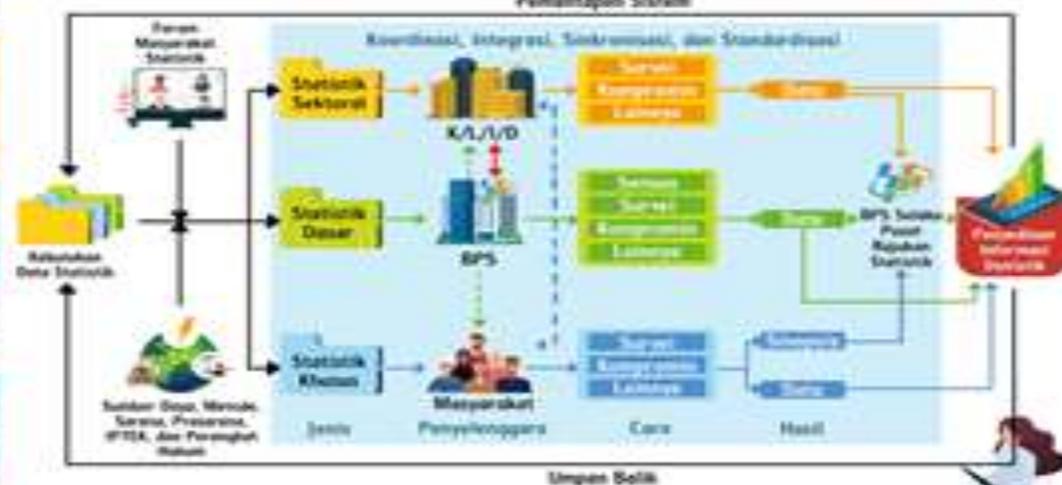
Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kematangan Penyebaran Data

Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data

Sistem Statistik Nasional

Pemantapan Sistem



Why?

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda dalam pemenuhan unsur-unsur SSN



KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses

Proses penyelenggaraan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada setiap unit kerja dalam organisasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 1. RINTISAN

-  Telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral namun, **pelaksanaannya masih bersifat sementara** (*ad-hoc*), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi
-  Pimpinan memiliki inisiatif untuk melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tetapi pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan
-  Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral **mungkin belum ada** atau **masih dalam bentuk konsep** sehingga belum dapat diterapkan





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 2. TERKELOLA



K/L/Pemda melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, **setiap unit organisasi melaksanakan** proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut **berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masing-masing**



Pimpinan **belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi** dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 3. TERDEFINISI

-  Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan **standar manajemen**
-  Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral **telah melaksanakan proses tata kelola dengan cara yang sama**
-  Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, keselarasan antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih menjadi kendala karena belum diintegrasikannya antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 4. TERPADU DAN TERUKUR

 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara terpadu dengan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral lain yang terkait dan telah menentukan serta melaksanakan mekanisme pengukuran kinerja dari proses-proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral terkait

 Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat **diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi** pada setiap proses





KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN

Tingkat 5. KEMATANGAN



Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **melakukan peningkatan kualitas** proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara berkesinambungan melalui pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran kinerja



Proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mengatur mekanisme perbaikan berkelanjutan





PREDIKAT PENILAIAN IPS

Kategori Nilai IPS	
4,2 - 5,0	Istimewa
3,5 - <4,2	Memuaskan
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

pemakaian istilah untuk nilai IPS mempertimbangkan keselarasan dengan istilah pada indeks-indeks lain agar mudah dibandingkan.

Perbandingan nilai IPS dengan nilai indeks dari sejumlah K/L.

SPBE	Kriteria	Max	Reformasi Birokrasi	Kriteria	Max	Pengawasan Kearsipan	Kriteria	Max	Pelayanan Publik	Kriteria	Max
Memuaskan	Optimum	5	Istimewa	AA	100	Sangat Memuaskan	AA	100	Pelayanan Prima	A	5
Sangat Baik	Terpadu & Terukur	4,2	Memuaskan	A	90	Memuaskan	A	90	Sangat Baik	A-	4,5
Baik	Terdefinisi	3,5	Sangat Baik	BB	80	Sangat Baik	BB	80	Baik	B	4
Cukup	Terkelola	2,6	Baik	B	70	Baik	B	70	Baik dengan catatan	B-	3,5
Kurang	Rintisan	1,8	Cukup	CC	60	Cukup	CC	60	Cukup	C	3
			Kurang	C	50	Kurang	C	50	Cukup dengan	C-	2,5
			Sangat Kurang	D	30	Sangat Kurang	D	30	Prioritas Pembinaan	D	2
									Prioritas Pembinaan	E	1,5
									Prioritas Pembinaan	F	1

SPIP	Max	Profesionalitas ASN	Max	Perilaku Anti Korupsi	Max	Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Max (skala 4)	Max (skala 100)
Optimum	5	Sangat Tinggi	100	Sangat anti korupsi	5	Sangat baik	A	4	100
Terkelola & Terukur	4,5	Tinggi	90	Anti korupsi	3,75	Baik	B	3,53	88,3
Terdefinisi	3	Sedang	80	Permisif	2,5	Kurang baik	C	3	76,6
Berkembang	2	Rendah	70	Sangat permisif	1,25	Tidak baik	D	2,6	64,99
Rintisan	1	Sangat Rendah	60						



METODE PELAKSANAAN PENILAIAN

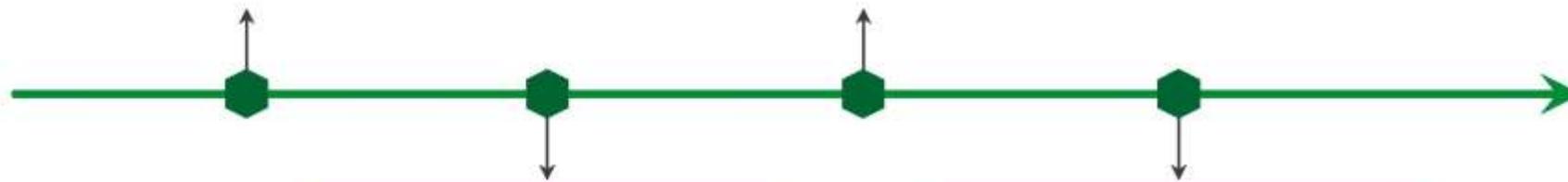
Penilaian Mandiri

- dilakukan TPI
- nilai tingkat kematangan
- penjelasan
- bukti pendukung

Penilaian Interviu

- dilakukan TPB
- tanya-jawab ke TPI dan/atau Responden
- catatan atas klarifikasi hasil Penilaian Dokumen

- dilakukan TPB
- finalisasi
- konsolidasi
- analisis nilai tingkat kematangan
- rapat pleno penilaian



Harmonisasi

Penilaian Dokumen

- dilakukan TPB
- verifikasi dokumen
- catatan atas dokumen

Penilaian Visitasi

- dilakukan TPB
- kunjungan ke Instansi Pusat dan Pemda
- validasi hasil penilaian dokumen dan/atau penilaian interviu
- catatan atas validasi



Alur Pelaksanaan Penilaian



Pembentukan TPI Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dari unsur:

1. Wali Data dan/atau Wali Data Pendukung
2. Produsen Data
3. Koordinator Forum Data Dengan Susunan
 1. Koordinator
 2. Ketua
 3. Anggota (termasuk supervisor dan operator)



- Penetapan TPI
- Pelaporan TPI ke Tim Pelaksana EPSS BPS
- Pendaftaran Akun untuk Login Aplikasi



• Admin BPS

- TPI mereviu isian operator



• Operator



- TPI merumuskan/menganalisis nilai

- TPI mengisi LKE beserta, penjelasan & bukti dukung



- TPI mengumpulkan bukti dukung & penjelasan

- Perubahan isian serta tambahan penjelasan dan bukti dukung



• Supervisor

- Persetujuan dan submit



- Nilai IPS yang diajukan



- Penilaian Dokumen oleh TPB

- Hasil Konsolidasi & Analisis



- Penilaian Interview oleh TPB
- Penilaian Visitasi oleh TPB
- Validasi Bukti Dukung & catatan validasi



- Rapat Pleno oleh TPB

- Keputusan



- Nilai IPS Final



- Laporan
- Catatan Evaluasi
- Rekomendasi





BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DEMAK



REGSOSEK
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI



77
PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

Terima Kasih!

www.demakkab.bps.go.id

